



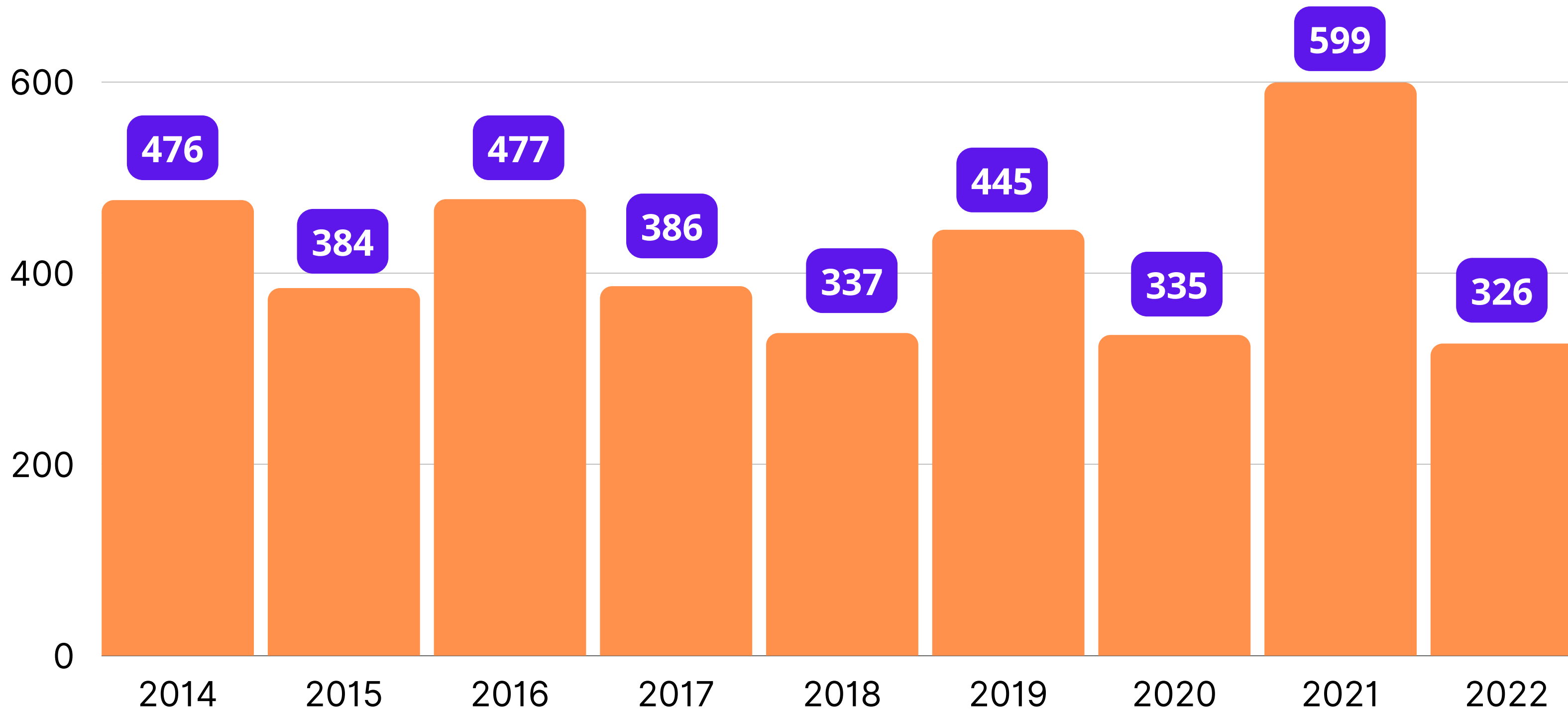
**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



JUMLAH, JENIS, DAN GAMBARAN UMUM PELANGGARAN YANG DILAPORKAN OLEH MASYARAKAT SERTA LAPORAN PENINDAKANNYA



Data Jumlah Pelanggaran yang Diterima Melalui Aplikasi Whistleblowing System Kementerian Keuangan

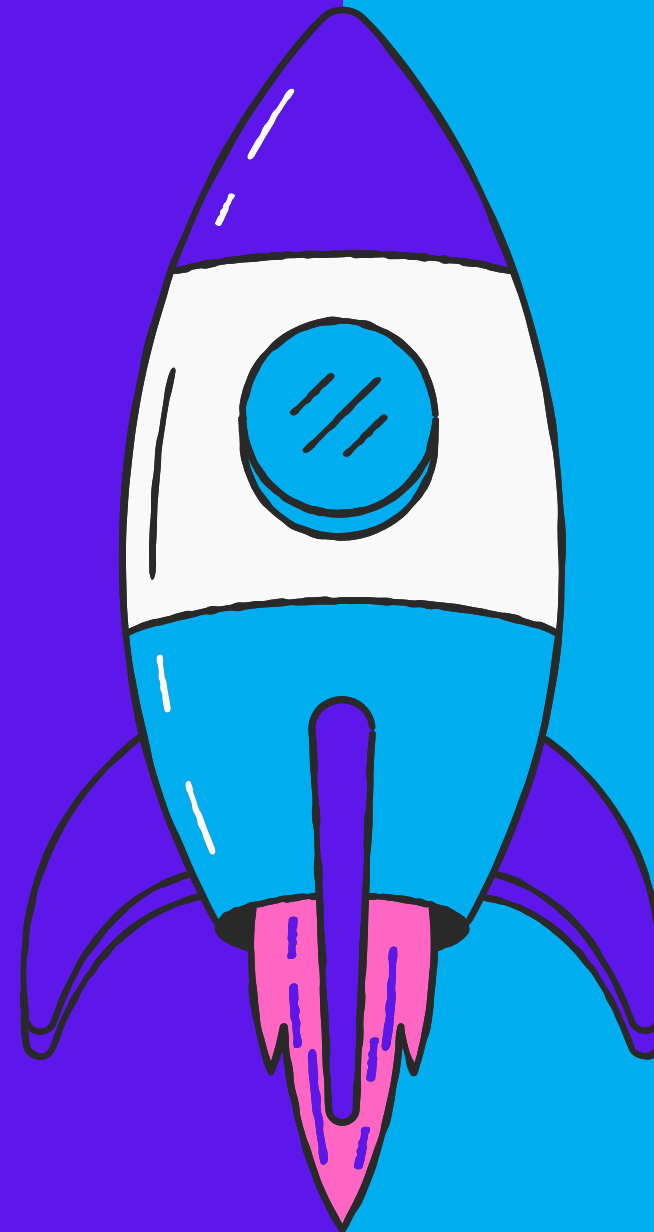




KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Gambaran Umum Pelanggaran

Whistleblowing System (WISE) Kementerian Keuangan merupakan saluran komunikasi yang bertujuan untuk menampung informasi terkait dugaan penyimpangan yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan layanan kepada masyarakat, serta pencegahan terjadinya kecurangan (fraud) yang melibatkan para pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan.



Pasal 1 angka 1 PMK 103/PMK.09/2010

tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik, dan kebijakan Kementerian Keuangan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan.



Jenis-Jenis Pelanggaran

Fraud

antara lain berupa penyalahgunaan wewenang, pemerasan, suap, gratifikasi (10%), dan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa.

Non Fraud

antara lain berupa pelanggaran atas pelayanan, pelanggaran prosedur, kehadiran bekerja, melalaikan kewajiban suami/istri/KDRT, dan pelanggaran administrasi kepegawaian.



Laporan Penindakan Pelanggaran

Tahun 2021

- Selama tahun 2021, jumlah pengaduan yang diterima oleh WISE Kementerian Keuangan sebanyak **599** pengaduan.
- Berdasarkan komposisi jenis pengaduan, jumlah pengaduan *fraud* memiliki porsi sebesar 174 (**29%**) sedangkan pengaduan non *fraud* sebanyak 425 (**71%**), dengan rincian sebagai berikut:

Pengaduan Fraud

didominasi adanya dugaan penyalahgunaan wewenang (**37%**), suap (**11%**), pemerasan (**10%**), gratifikasi (**5%**), dan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa (**6%**).

Pengaduan Non Fraud

masih didominasi dengan dugaan pelanggaran atas pelayanan (**15%**), pelanggaran prosedur (**13%**), perbuatan merusak citra organisasi (**7%**) dan melalaikan kewajiban suami/istri/KDRT (**4%**).

Laporan Penindakan

- Per 31 Desember 2021, dari 599 pengaduan, **82%** telah diselesaikan, dan sebanyak **18%** pengaduan masih dalam proses penanganan.
- Pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor yang membatasi kegiatan tindak lanjut penanganan pengaduan, khususnya atas kasus yang terjadi di daerah.



Laporan Penindakan Pelanggaran

Semester I Tahun 2022

- Selama semester I tahun 2022, jumlah pengaduan yang diterima oleh WISE Kemenkeu adalah sebanyak **326** pengaduan.
- Berdasarkan komposisi jenis pengaduan, jumlah pengaduan fraud memiliki porsi sebesar 95 (**29%**) sedangkan pengaduan non fraud sebanyak 231 (**71%**), dengan rincian sebagai berikut:

Pengaduan Fraud

didominasi atas dugaan penyalahgunaan wewenang (32%), pemerasan (15%), suap (11%), gratifikasi (10%), dan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa (6%).

Pengaduan Non Fraud

didominasi dengan dugaan pelanggaran atas pelayanan (17%), pelanggaran prosedur (8%), kehadiran bekerja (3%), melalaikan kewajiban suami/istri/KDRT (3%), dan pelanggaran administrasi kepegawaian (3%)

Laporan Penindakan

Dari 326 pengaduan, **63%** pengaduan telah diselesaikan dan **37%** pengaduan masih dalam proses penanganan.